

**Politik Perubahan Penggunaan Lahan di Kalimantan Tengah:
Lemahnya Tata Kelola yang Memicu Bencana Lingkungan**

Katriani Puspita Ayu

Katriani.lamey@fisip.upr.ac.id

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Palangka Raya

ABSTRACT

The conversion of forest which occurred in Central Kalimantan was caused by the need for land expansion in the aim to meet the needs of food, infrastructure, and settlements. This study intends to identify how much forest has been converted into non-forest land, to point out the trend of increasing oil palm plantations, and spot the ecological impacts associated with land changes. The data described through a comparison of land use condition from 2014 to 2020 and take into account the condition of Central Kalimantan when it was hit by haze disaster in 2015 and 2019. The data shows that the decline in forest cover was followed by an increase in the expansion of oil palm plantations in the same timeframe. There was also an increase in the number of villages affected by the disaster in the same period of 2014 and 2018. Although the number of forest and land fires in 2019 was lower than in 2015, the data shows the distribution of hotspots which potentially trigger fires and haze remains high. In conclusion, land-use change is strongly correlated with the reduction of forest cover and the expansion of large-scale plantations. This situation is further exacerbated by documented cases of permit violations committed by plantation companies. Weak law enforcement and inconsistent policy implementation have also contributed to illegal land conversions, resulting in environmental degradation. There is an urgent need for environmentally oriented land-use management, supported by all stakeholders involved in land-use policy design, to ensure that such policies prioritize not only economic and political interests but also long-term ecosystem sustainability.

Keywords: *Land Use Management, Natural Disaster, Land Governance*

ABSTRAK

Alih fungsi hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah disebabkan oleh adanya kebutuhan perluasan lahan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan yang meningkat, pembangunan infrastruktur dan pemukiman. Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi seberapa besar hutan yang telah di konversi menjadi lahan non-hutan, trend peningkatan tanaman industri sawit, dan melihat dampak ekologis yang terjadi akibat perubahan lahan. Data yang di kumpulkan akan di deskripsikan melalui perbandingan dari periode waktu 2014 hingga 2020 dengan mempertimbangkan kondisi Kalimantan Tengah saat dilanda kabut asap tahun 2015 dan 2019. Data menunjukkan bahwa penurunan tutupan

hutan diikuti dengan meningkatnya perluasan perkebunan sawit dalam periode waktu yang sama. Didapati pula adanya peningkatan desa yang terdampak bencana dalam kerangka waktu 2014 dan 2018. Angka kebakaran hutan dan lahan di tahun 2019 lebih rendah dari 2015, namun tetap menunjukkan sebaran hotspot yang berpotensi memicu api dan kabut asap. Dapat disimpulkan bahwa perubahan lahan berhubungan erat dengan berkurangnya tutupan lahan dan perluasan perkebunan besar. Hal ini diperparah dengan temuan adanya pelanggaran perijinan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Penegakan hukum yang lemah dan implementasi kebijakan yang tidak konsisten juga berkontribusi pada perubahan lahan ilegal yang berujung pada kerusakan alam. Dibutuhkan pengelolaan alih fungsi lahan yang berorientasi pada lingkungan dan didukung segenap pemangku kepentingan yang mendesain kebijakan perubahan lahan agar tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan ekonomi dan politik, tapi juga keberlangsungan ekosistem.

Kata kunci: Pengelolaan Penggunaan Lahan, Bencana Alam, Tata Kelola Lahan

PENDAHULUAN

Perubahan lahan merupakan fenomena yang semakin mendesak untuk diperhatikan, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Kalimantan Tengah. Dalam beberapa dekade terakhir, konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman telah meningkat pesat. Praktik ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Kalimantan Tengah, yang memiliki hutan tropis yang luas dan lahan gambut yang kaya, menjadi salah satu daerah yang paling terpengaruh oleh perubahan lahan ini. Bencana alam, seperti kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor, sering kali dipicu oleh perubahan lahan yang tidak berkelanjutan. Deforestasi dan pengeringan lahan gambut, misalnya, tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati tetapi juga meningkatkan risiko bencana alam. Kebakaran hutan yang terjadi di lahan gambut sulit dipadamkan dan dapat menyebar dengan cepat, mengakibatkan kerusakan yang luas dan dampak kesehatan yang serius bagi masyarakat. Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam, penting untuk memahami hubungan antara perubahan lahan dan bencana alam di Kalimantan Tengah.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan proses perubahan fungsi sebagian atau seluruh sebuah kawasan dari fungsi semula yang telah di rencanakan menjadi fungsi lainnya yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Alih fungsi untuk penggunaan lain disebabkan munculnya kebutuhan manusia akan pangan ataupun kegiatan produksi lainnya yang membutuhkan area yang luas. Proses alih fungsi lahan yang mencakup luasan lahan yang besar, yang peruntukannya membangun infrastruktur, perumahan dan perkebunan monokultur skala masif akan berpotensi memiliki dampak yang juga lebih besar.

Untuk itu perlu adanya upaya pemantauan terhadap perubahan lahan agar dampak dari perubahan tutupan lahan dapat ditanggulangi. Dibutuhkan pengelolaan lahan untuk mencegah kerusakan lingkungan maupun merencanakan pengembangan sumberdaya terkait dengan cara-cara yang lestari, khususnya di daerah-daerah yang kaya akan kawasan hutan seperti di Kalimantan Tengah.

Saat ini kondisi tutupan lahan di Kalimantan Tengah telah banyak mengalami perubahan akibat perluasan perkebunan. Kebutuhan akan lahan perkebunan, khususnya monokultur untuk mengubah lahan hutan menjadi lahan dengan tipe pemanfaatan lahan perkebunan yang pada umumnya dikuasai oleh perusahaan dan masyarakat yang bermodal besar. Mengingat pentingnya peruntukan lahan untuk pertumbuhan ekonomi, maka perlu diteliti peruntukan lahan khususnya di wilayah yang memiliki perkebunan industri berskala besar, seperti di Kalimantan Tengah. Sejalan dengan perluasan perkebunan tanaman agro-industri seperti kelapa sawit, tidak dapat dihindari munculnya dampak terhadap lingkungan baik air maupun tanah dimana lahan hutan telah di tebang. Dampak negatif yang saat ini sering muncul di Kalimantan Tengah diantaranya adalah kebakaran lahan, kabut asap, banjir dan erosi tanah. Dalam periode waktu 10 tahun terakhir, telah terjadi setidaknya 2 kali kebakaran hutan yang parah sehingga menyebabkan kabut asap yang tebal. Dan pada musim hujan, setidaknya 3 kabupaten di Kalimantan Tengah yang tidak pernah absen terdampak banjir. Hal ini merupakan pertanda bahwa lingkungan perlu diperbaiki untuk menjaga keberlanjutan hutan dengan melestarikan fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air melalui arahan penggunaan lahan yang tepat.

Selain secara teknis di butuhkan ilmu kehutanan, geografi dan lingkungan, studi ini juga membutuhkan perspektif ilmu politik lingkungan yang bertujuan menganalisis berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pertanian, kehutanan bahkan perijinan. Beberapa faktor-yang di maksud mencakup faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan teknologi. Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, politik lingkungan merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar pembangunan dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan melalui tata guna lahan yang baik, pengelolaan konversi lahan, dan penerbitan perijinan kebun yang sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Walaupun sejatinya perkebunan monokultur seperti sawit merupakan penggerak ekonomi terbesar di Indonesia, namun kegiatan perusahaan-perusahaan perkebunan dapat mengeksploitasi sumber daya alam dan lahan untuk perluasannya.

Dilema antara meningkatkan sektor pertanian melalui pembukaan lahan dengan kerusakan yang muncul diakibatkannya, menjadikan politik lingkungan merupakan sudut pandang yang menarik untuk di bahas. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimanapun perubahan lahan secara detail mempengaruhi keadaan

ekologi, perlu diketahui perubahan tutupan dan penggunaan lahan yang terjadi dari tahun ke tahun, kapan bencana asap dan banjir terjadi serta lokasi nya. Study ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan lahan dan pola perubahannya pada hutan dari tahun 2014-2020, menganalisis munculnya bencana dan keterkaitannya dengan lokasi-lokasi bencana agar dapat melihat pengaruh perubahan penggunaan lahan dan kerusakan ekologi di area terdampak.

Penyebab perubahan lahan dan dampaknya di Kalimantan Tengah

Perubahan lahan dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor seperti ekspansi perkebunan dan pertambangan, pembangunan infrastruktur, perubahan iklim, pergantian kebijakan dan keterbatasan penegakan hukum. Saat ini, diperkirakan penyebab konversi lahan utamanya dikarenakan muncul karena permintaan akan produk pertanian dan perkebunan yang meningkat. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah lahan yang diganti menjadi Perkebunan besar, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk akses jalan, pabrik maupun sarana prasarana yang dibutuhkan perkebunan tersebut. Ekspansi perkebunan sawit merupakan konversi lahan terbesar di Kalimantan Tengah dan seringkali mendorong perusahaan untuk membuka lahan baru dengan membuka hutan dan mengeringkan lahan gambut (Boehm & Siegert, 2004). Praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan, seperti pembakaran lahan untuk membuka area baru, juga berkontribusi pada perubahan lahan. Pembakaran sering kali menyebabkan kebakaran hutan yang meluas dan kerusakan ekosistem. Hal ini menunjukkan praktik pengelaaan lahan yang tidak berkelanjutan. Selain itu, aktivitas penambangan, baik untuk batu bara, mineral, maupun sumber daya lainnya, juga berkontribusi pada perubahan lahan. Penambangan sering kali mengakibatkan deforestasi dan kerusakan ekosistem yang luas (Ibie et al, 2016).

Perubahan lahan di Kalimantan Tengah tentu saja tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam melalui izin yang diberikan untuk konversi lahan (Boehm & Siegert, 2001). Perubahan lahan yang terjadi juga sangat di pengaruhi perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan meningkat (Horton et al, 2021). Jika dilihat dari sudut pandang tata kelola lahan, alih fungsi lahan yang dikelola serampangan baik oleh perusahaan perkebunan maupun individu seyogyanya didukung oleh penegakan hukum terkait pengelolaan lahan. Perlindungan hutan seharusnya juga menjadi target utama agen pemerintah agar tidak terjadi eksploitasi yang tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang berkontribusi dalam perubahan lahan. Ini berarti perluasan lahan yang tidak seharusnya diubah menjadi bentuk lain berkorelasi positif terhadap lemah dan terbatasnya penegakan hukum (Gnych & Daemeter, 2014). Hal ini tidak terlepas dari praktik otonomi daerah di provinsi-provinsi yang

kaya akan lahan perhutanan seperti di Kalimantan Tengah. Terdapat pula indikasi kuat bahwa konversi lahan telah di rancang sejak awal oleh beberapa pemangku kepentingan melalui perencanaan tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) yang di rencanakan untuk pencapaian ketahanan pangan. Ini berarti, perubahan tata kelola lahan di daerah seperti di Kalimantan Tengah terjadi karena faktor ekonomi sekaligus politik.

Dilihat dari aspek ekologis, David Gaveau menghitung jeda antara deforestasi dan pendirian perkebunan tanaman industri untuk menentukan seberapa cepat industri sawit berkembang setelah penggundulan hutan. Gaveau mempertanyakan apakah benar sawit yang bertanggung jawab terhadap penggundulan hutan. Dalam penelitiannya, Gaveau membenarkan bahwa mayoritas perkebunan sawit dikembangkan di lahan terdegradasi, yaitu hutan terkonversi menjadi paku-pakuan, rumput dan semak akibat kekeringan dan kebakaran yang berulang terutama pada musim kemarau. Namun demikian, meskipun penanaman sawit dilakukan di lahan terdegradasi, angka deforestasi tetap sangat tinggi. Sejak tahun 2005, Pulau Kalimantan secara umum mengalami ledakan pembangunan perkebunan dan peningkatan konversi hutan menjadi perkebunan banyak terjadi di tahun 2005 (Gaveau). Ini berarti bahwa Gaveau tetap melihat adanya keterkaitan ekspansi sawit dengan pembabatan hutan di Kalimantan,

Menurut Pablo Pacheco, ekspansi kelapa sawit meningkat secara gradual dan berkembang pada beragam jenis pemanfaatan lahan, mulai dari hutan, sistem agroforestri bahkan lahan yang terdegradasi. Pacheco menegaskan bahwa beragam dinamika pemanfaatan lahan terkait dengan ekspansi sawit. Hal ini juga di perjelas oleh Sheil yang menyatakan bahwa yang menjadi masalah utama bukan lah jenis tanamannya (sawit), melainkan dimana tanaman tersebut di tanam. Sejalan dengan itu, Gaveau juga menyatakan bahwa kecepatan regenerasi lahan terdegradasi sangatlah lambat. Ini berarti, meskipun lahan yang telah rusak di tanami Kembali dengan sawit, kemampuan lahan tersebut untuk regenerasi sangat rendah, disebabkan kebakaran yang berulang. Meijaard juga menekankan bahwa temuannya merujuk pada adanya peran besar perkebunan industri sawit dalam deforestasi. Beberapa catatan dari pakar lingkungan telah mencatat bahwa perubahan lahan menjadi bentuk lain dengan cara ekspansi yang eksploitatif dapat menyebabkan kerusakan alam (table 1).

Tabel 1. Korelasi Perubahan Lahan dan Kemunculan Bencana Alam

Jenis Bencana	Penyebab Perubahan Lahan	Dampak terhadap Perubahan Lahan	Sumber Studi
Banjir	Deforestasi dan konversi lahan	Mengurangi kapasitas penyerapan air dan meningkatkan aliran permukaan	Mastorillo, M., et al. (2016)
Banjir	Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian	Mengurangi kapasitas resapan dan meningkatkan aliran permukaan	Pahlow, M., et al. (2016)
Banjir	Deforestasi dan pengeringan lahan gambut	Meningkatkan risiko banjir dan kerusakan ekosistem	Hooijer, A., et al. (2010)
Tanah Longsor	Penggundulan hutan dan pembangunan infrastruktur	Mengurangi stabilitas tanah dan meningkatkan erosi	Sidle, R.C., et al. (2006)
Kebakaran Hutan	Pembukaan lahan untuk pertanian	Meningkatkan risiko kebakaran dan mengurangi kelembaban tanah	Cochrane, M.A. (2003)
Kebakaran Hutan	Pembakaran lahan untuk pertanian	Meningkatkan emisi karbon dan mengurangi kualitas udara	Levine, N. (2015)
Kebakaran Hutan	Deforestasi dan perubahan iklim	Meningkatkan frekuensi kebakaran hutan	Andela, N., et al. (2017)

Jenis Bencana	Penyebab Perubahan Lahan	Dampak terhadap Perubahan Lahan	Sumber Studi
Kebakaran Hutan	Pembukaan lahan untuk pertanian	Meningkatkan risiko kebakaran dan kerusakan ekosistem	Cochrane, M.A. (2003)

Sumber: tabulasi peneliti dari berbagai sumber literatur

Jika dilihat dari aspek politis, perubahan lahan terjadi karena adanya tuntutan investasi dari luar untuk membuka perkebunan sawit yang ijinnya dikeluarkan oleh pusat. Sangat jelas bahwa pelanggaran dalam penerbitan ijin, penyalahgunaan wewenang dalam penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam oleh aparatus pemerintah, dan konflik kepentingan antar aktor pemilik perkebunan dengan elit-elit lokal menjadikan persoalan tata kelola lahan bukan hanya urusan ekonomi dan ekologi, namun dipengaruhi juga dengan dinamika politik, baik daerah maupun nasional. Otonomi daerah yang sempat terjadi pada permulaan masa reformasi juga telah berkontribusi dalam melahirkan perkebunan sawit secara massif melalui ijin-ijin yang dikeluarkan pemerintah daerah. Pemberian wewenang berlebih pada pejabat-pejabat kabupaten untuk menerbitkan ijin sawit tanpa prosedur yang legal serta tidak transparan menjadikan perubahan fungsi lahan adalah bahan jualan antara pihak swasta dan oknum pejabat. Kejahatan tersebut menjadikan alih fungsi lahan melalui kegiatan pembukaan lahan yang terindikasi maladministrasi berpotensi korup dan berpihak pada pemilik modal atau perusahaan besar. Hal ini juga di buktikan dengan tertangkapnya elit politik maupun pejabat yang menerima suap untuk penerbitan ijin maupun perluasan kawasan perkebunan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menekankan pada interaksi yang kompleks antara politik, ekonomi dan lingkungan serta perubahan institusi yang menyebabkan meningkatnya perubahan fungsi lahan di Kalimantan Tengah. Perubahan lahan memicu transformasi pada ekosistem maupun relasi sosial manusia, dan keseluruhan pemicu ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk memahami sebab dan akibat dari proses perubahan lahan di Kalimantan Tengah, diperlukan pendekatan secara menyeluruh baik yang merujuk pada hasil dari penelitian maupun pengetahuan dari literatur tentang bagaimana dampak perubahan lingkungan bagi alam maupun masyarakat. Beberapa indikator yang di gunakan dalam tulisan ini dipilih berdasarkan keadaan saat ini dan membandingkannya dengan keadaan sebelumnya.

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana hal tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi secara faktual dan sistematis. Pada kajian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjadinya fenomena yang terjadi. Beberapa data dan informasi yang di kumpulkan adalah : (1) Luasan tutupan hutan, (2) Perluasan Area Perkebunan Sawit, (3) Jumlah luasan lahan yang melanggar aturan perijinan, (4) Jumlah Desa yang terdampak bencana, (5) Jumlah titik api (hotspot) dan (6) luasan kebakaran hutan. Informasi yang terkumpul kemudian di tabulasi dan di paparkan dalam bentuk grafik agar dapat dilihat trend maupun hubungan diantara data tersebut. Proses ini di harapkan dapat mengidentifikasi keadaan saat ini serta kecenderungan yang berpotensi terjadi dimasa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rusaknya tutupan vegetasi menggiring pada bencana ekologi

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah rekapitulasi data dari BPS yang bersumber dari Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu Sebagian data juga di ekstrak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta situs SiPongi Monitoring System untuk data kebakaran hutan dan lahan. Keseluruhan data digunakan untuk mendeskripsikan sejauh mana transformasi hutan dan lahan berpengaruh pada keadaan ekologi Kalimantan Tengah. Pada tahapan awal, tabulasi data luasan tutupan hutan sejak 2014 hingga 2020 akan menunjukkan trend semakin bertambah atau berkurangnya jumlah tutupan vegetasi di Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Selanjutnya data ini di bandingkan dengan data perluasan perkebunan sawit dalam kurun waktu yang sama agar dapat di lihat perbandingannya. Dapat dilihat bahwa luasan tutupan hutan di Kalimantan Tengah pada periode tahun 2014-2020 mengalami penurunan sebesar 561,9 Ha seperti yang di tunjukan grafik 1.

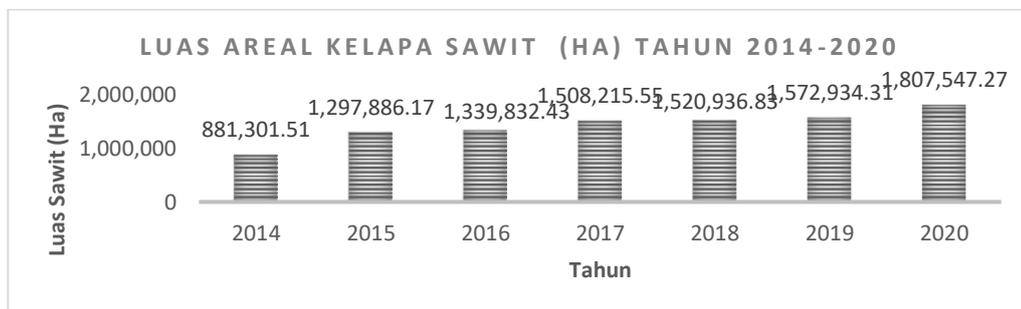
Grafik 1. Luasan Tutupan Lahan Kalimantan Tengah Tahun 2014-2020 (Ha)



Sumber: BPS Kalimantan Tengah yang di laporkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan diolah Kembali oleh peneliti

Penurunan jumlah tutupan hutan sejak 2014 hingga 2020 juga diikuti oleh perluasan perkebunan sawit yang meningkat 926.245,76 Ha dalam kurun waktu 6 tahun atau meningkat 1 juta Ha dalam jangka waktu kurang dari satu dekade. Angka ini menunjukkan betapa cepatnya perluasan sawit di Kalimantan Tengah.

Grafik 2 Perluasan Area Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah periode tahun 2014-2020 (Ha)



Sumber: BPS Kalimantan Tengah yang di laporkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan diolah Kembali oleh peneliti

Ancaman Tata Kelola Lahan yang Buruk

Perubahan penggunaan lahan merupakan keadaan bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu penggunaan ke penggunaan yang lainnya dan diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu selanjutnya. Perubahan ini juga berpengaruh pada bergantinya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. Perubahan penggunaan lahan alami umumnya berdampak negatif terhadap lingkungan, meskipun tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa dampak buruk dari perluasan lahan yang mengancam masyarakat adalah banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan yang berpotensi menghasilkan kabut asap. Ketiga bencana ini

berkorelasi erat dengan pembukaan maupun perluasan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.

Grafik 3 Perbandingan Jumlah Desa yang terdampak bencana Longsor, Banjir dan Karhutla pada 2014 dan 2018



Sumber: BPS Kalimantan Tengah dan diolah Kembali oleh peneliti

Grafik diatas menunjukkan jumlah desa yang terdampak bencana longsor, banjir dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah sejak 2014 sampai 2018. Meskipun angka desa yang terdampak karena bencana tanah longsor jumlahnya lebih sedikit dari jumlah desa yang terdampak banjir dan karhutla, namun ini menandakan bahwa perubahan fungsi lahan juga berdampak pada erosi tanah. Data diatas menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah kasus di lokasi-lokasi perubahan lahan sering terjadi, karena alih fungsi hutan dan lahan lebih sering terjadi di kabupaten dan daerah-daerah yang jauh dari kota. Menurut BPS Kalimantan Tengah, pada tahun 2014 desa yang terkena dampak terbesar longsor adalah Murung Raya dengan jumlah desa terdampak sebesar 10 desa. Angka ini mengalami peningkatan di tahun 2018, dimana Kabupaten yang terdampak longsor masih Murung Raya dengan jumlah 19 desa yang terdampak. Sedangkan penyebab banjir di sejumlah kabupaten termasuk di kota Palangka Raya bersumber dari alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan kawasan hutan di bagian hulu gundul dan tidak mampu menahan air saat intensitas hujan deras. BPS mencatat bencana banjir di tahun 2014 yang paling terdampak adalah Katingan dengan 89 desa dan jumlah ini mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 115 desa yang terdampak dan masih di Kabupaten yang sama, yaitu Katingan. Kabupaten ini termasuk kabupaten yang memiliki jumlah perkebunan sawit berskala besar cukup banyak sehingga sangat mungkin menyebabkan banyak kawasan termasuk permukiman dan infrastruktur di Kabupaten ini terdampak banjir dikarenakan daerahnya minim resapan.

Bencana ketiga yang mengalami peningkatan tajam dari tahun 2014 ke 2018 adalah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi karena alih fungsi lahan khususnya di area yang memiliki gambut menjadi perkebunan dan menyebabkan terjadinya peningkatan emisi CO₂ ke atmosfer. BPS mencatat Katingan mengalami karhutla dengan 43 desa yang paling banyak terdampak, dan pada tahun 2018 Kapuas menjadi kabupaten dengan 96 desa yang terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan. Pada musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan kekeringan yang memicu peningkatan jumlah titik panas (hotspot) di area-area gambut yang terdegradasi. Jumlah titik api yang diambil untuk tulisan ini merupakan data pada tahun 2015 dan 2019 dimana kebakaran hebat terjadi di dua tahun tersebut dan menyebabkan bencana kabut asap di Kalimantan Tengah.

Tabel 2 Jumlah Titik Panas dan Luasan Area yang terdampak Karhutla tahun 2015 dan 2019

Tahun	Luas Area (Ha)	Jumlah Titik Panas
2015	583.833	5.176
2019	317.749	3.354

Sumber: Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada table diatas dapat di lihat bahwa jumlah titik panas berkorelasi dengan jumlah luasan area yang terbakar. Di tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan dianggap kebakaran yang terparah setelah kebakaran tahun 1997/1998. Jumlah kawasan yang terbakar di tahun 2015 mencapai 583 ribu hektar dan sebaran titik panas di Kalimantan Tengah mencapai 5176 titik. Di tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di lebih dari 300 ribu hektar area dengan 3.354 titik api yang menyebabkan kabut asap tebal. Walaupun pada kedua tahun tersebut tidak menunjukkan tren kenaikan, namun pada kenyataannya, bencana karhutla mempengaruhi setiap aspek dan sendi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Angka-angka pada table 2 muncul dikarenakan adanya perubahan fungsi lahan yang tadinya hutan menjadi fungsi lain yang pembukaan lahannya menggunakan api dan terjadi di daerah-daerah yang kaya akan gambut. Terlepas pembukaan lahan di lakukan oleh perusahaan besar sawit maupun masyarakat petani sawit, pembersihan hutan dan lahan melalui metode pembakaran telah menjadi pemicu terbesar dari kebakaran hutan maupun lahan- selain kekeringan pada kawasan gambut yang meliputi hampir separuh wilayah Kalimantan Tengah.

Perubahan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah tentu saja didukung oleh kebijakan yang melandasi pengelolaan tanah dan lahan, baik yang bersumber dari peraturan nasional maupun daerah. Beberapa kebijakan yang berkenaan dengan perubahan lahan dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3. Kebijakan Pengelolaan Lahan di Kalimantan Tengah dan implementasinya

Kebijakan/Peraturan	Deskripsi Kebijakan	Kegagalan Implementasi	Dampak Bencana
Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lahan Gambut	Mengatur perlindungan dan restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran dan subsiden.	Pembukaan lahan gambut untuk perkebunan sawit tetap masif, terutama di wilayah eks-Proyek Lahan Gambut (PLG) seperti Pulang Pisau dan Kapuas. Kanalisasi gambut oleh perusahaan perkebunan (misal: PT AGL, PT CAA) tidak dihentikan, mengeringkan gambut dan meningkatkan kerentanan kebakaran.	Kebakaran hutan berulang (2015, 2019, 2023) dengan emisi karbon tinggi. Banjir akibat subsidensi gambut, seperti di Kabupaten Barito Selatan (2021).
Perda No. 6 Tahun 2014 tentang RTRW Kalimantan Tengah	Mengatur zonasi lahan untuk mengurangi alih fungsi hutan dan lahan gambut.	Tumpang tindih izin antara kawasan lindung dan konsesi perkebunan, misal di Kabupaten Kotawaringin Barat. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang oleh korporasi.	Deforestasi meningkat (rata-rata 150.000 ha/tahun), mempercepat erosi dan banjir bandang. Konflik lahan dengan masyarakat adat memperparah degradasi lingkungan.
PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana	Meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam mitigasi bencana.	Respons lambat saat kebakaran gambut 2019, karena koordinasi BPBD dan KLHK tidak optimal. Minimnya anggaran untuk pencegahan, hanya fokus pada tanggap darurat.	Kabut asap lintas negara akibat karhutla yang tidak tertangani cepat.

Kebijakan/Peraturan	Deskripsi Kebijakan	Kegagalan Implementasi	Dampak Bencana
Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Melindungi sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan.	Pembalakan liar dan alih fungsi lahan tetap terjadi, terutama untuk sawit dan tambang. Tidak ada sanksi tegas bagi pelaku perusakan lingkungan.	Menurunnya kualitas ekosistem karena pembalakan liar dan eksploitasi sumber daya alam.

Sumber: tabulasi peneliti

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas tentang kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di Kalimantan Tengah, serta tantangan dan dampak yang dihadapi akibat kegagalan implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam, pelaksanaan yang tidak efektif telah menyebabkan masalah serius, termasuk bencana alam yang berulang. Selain itu, jika di telah dari implemetasi kebijakan pemerintah pusat yang juga kurang efektif di daerah ikut berkontribusi pada dampak bencana alam di Kalimantan Tengah. Berikut beberapa kebijakan pusat yang telah ditabulasi dan dianalisis dengan keadaan bencana alam yang terjadi di Kalimantan dalam kurun waktu 2019-2025.

Tabel 4. Kebijakan Pengelolaan Lahan Nasional yang berimplikasi di Kalimantan Tengah

Kebijakan /Peraturan	Deskripsi	Kegagalan Implementasi	Contoh Kasus di Kalteng	Dampak Bencana
PP No. 57 Tahun 2016 (Revisi PP No. 71/2014)	Perlindungan ekosistem gambut melalui restorasi dan pelarangan drainase.	Pembukaan lahan gambut untuk sawit tetap marak, terutama di eks-PLG Sejuta Hektar.	PT AGL di Kab. Pulang Pisau membangun kanal di gambut lindung (2023).	Kebakaran gambut 2019 (216 juta ton CO ₂).

Kebijakan /Peraturan	Deskripsi	Kegagalan Implementasi	Contoh Kasus di Kalteng	Dampak Bencana
Permen LHK No. 14/2017	Tata cara inventarisasi dan penetapan fungsi gambut.	Tidak ada penegakan hukum terhadap perusahaan yang mengubah fungsi gambut.	PT CAA di Kab. Kapuas mengeringkan gambut untuk sawit tanpa izin (2022).	Subsistensi gambut menyebabkan banjir tahunan di Barito Selatan.
PP No. 21 Tahun 2008	Penanggulangan bencana dengan koordinasi antarlembaga.	Respons lambat saat karhutla 2023 karena BPBD dan KLHK tidak sinkron.	Kebakaran di Kotawaringin Timur (2025) baru dipadamkan setelah 3 hari.	Kabut asap hingga Palangka Raya (ISPU Tidak Sehat).
Inpres No. 5 Tahun 2019	Pelarangan izin baru di hutan primer dan gambut.	Izin sawit ilegal masih diterbitkan di lahan gambut lindung.	PT BCMP beroperasi di zona lindung Kab. Seruyan (2024).	Deforestasi 150.000 ha/tahun.
Permen LHK No. 10/2019	Pengelolaan puncak kubah gambut berbasis KHG.	Tidak ada pemetaan ulang kubah gambut yang rusak akibat perkebunan.	Kubah gambut di Kab. Sukamara rusak parah (2023).	Krisis air saat musim kemarau.

Sumber: tabulasi peneliti

Tabel ini menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi, dengan bukti empiris dari kasus di Kalimantan Tengah. Kebijakan gambut dan penanggulangan bencana gagal karena minimnya penegakan hukum dan konflik kepentingan ekonomi-politik.

Pada saat yang sama, dengan serangkaian kebijakan yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan dan alokasi lahan, terjadi pula pelanggaran yang dilakukan agen pemerintah dalam penerbitan ijin perkebunan. Melalui data yang di kumpulkan dan diproses, di temukan adanya sejumlah pelanggaran perijinan di Kalimantan Tengah sejak 2008 hingga 2018. Hal ini dapat dilihat bahwa perubahan hutan menjadi lahan perkebunan juga di dukung melalui aspek politis, yaitu proses perijinan yang lunak dan cepat sehingga adanya tumpang tindih tanggal terbitnya Ijin Lokasi (IL) dan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang terlalu dekat. Hal ini mengindikasikan adanya kemudahan dalam perijinan dikarenakan percepatan proses keluarnya ijin yang seharusnya masih harus melalui proses AMDAL yang cukup memakan waktu. Peneliti mentabulasi data yang ada dengan melihat perbedaan tanggal IL dan IUP yang terlalu dekat yaitu kurang dari 6 bulan, sehingga dapat disimpulkan adanya percepatan proses perijinan sangat berkaitan dengan transaksi antara pihak perusahaan besar dengan oknum pemberi ijin (Grafik 4).

Grafik 4. Jumlah Pelanggaran Perijinan Sawit di Kalimantan Tengah (Ha)



Sumber : Diolah peneliti berdasarkan pengambilan data pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Kebijakan nasional seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta Inpres No. 5/2019 tentang Penghentian Izin Baru di Hutan Primer dan Gambut seharusnya membatasi ekspansi perkebunan sawit di lahan gambut. Namun, implementasinya di Kalimantan Tengah lemah karena perizinan sawit masih dikeluarkan oleh pemerintah daerah meski bertentangan dengan aturan pusat. Ini artinya KLHK tidak memiliki kapasitas memadai untuk memantau ribuan hektar konsesi, sehingga perusahaan sawit tetap membuka lahan secara ilegal. Perda Kalimantan Tengah No. 2/2018 tentang Pengelolaan Lahan Gambut seharusnya melindungi gambut dari alih fungsi, tetapi pelanggar hanya dikenakan denda administratif ringan selain itu, beberapa izin diterbitkan tanpa kajian lingkungan (Amdal) yang memadai.

Kegagalan kebijakan-kebijakan pusat dan daerah ini menciptakan "ruang abu-abu" bagi perkebunan ilegal. Jika tidak diperbaiki, degradasi gambut dan bencana ekologis akan terus berulang.

KESIMPULAN

Perubahan penggunaan lahan dapat disebabkan faktor ekonomi maupun politik, namun sayangnya tidak memperhitungkan dampaknya pada lingkungan. Data yang ada telah menunjukkan bahwa alih fungsi hutan dan lahan menjadi bentuk lain seperti perkebunan besar sawit dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti longsor, banjir dan kebakaran hutan. Berkurangnya tutupan hutan dan masifnya perluasan kebun merupakan salah satu bukti perubahan penggunaan lahan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Salah satu langkah krusial dalam mengatasi krisis lingkungan di Kalimantan Tengah adalah dengan mencabut izin operasi perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Perlindungan Gambut. Restorasi ekosistem gambut, khususnya di bekas Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar, harus menjadi prioritas. Pembasahan kembali (*rewetting*) melalui pembangunan sekat kanal dan penanaman vegetasi asli gambut. Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah belum cukup kuat karena sanksinya hanya berupa denda administratif yang tidak signifikan bagi perusahaan besar. Perlu revisi untuk mengintegrasikannya dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memungkinkan sanksi pidana dan denda progresif. Selain itu, aturan harus diperjelas untuk mencegah tumpang tindih izin.

Selanjutnya, jika dilihat dari aspek politik, proses perijinan yang illegal untuk pembukaan maupun perluasan perkebunan sawit merupakan salah satu penyebab alih fungsi lahan yang merugikan alam dan berpotensi menimbulkan bencana. Oleh karenanya, dibutuhkan pengelolaan alih fungsi lahan yang menggunakan prosedur yang benar seperti : identifikasi, pemantauan dan evaluasi penggunaan lahan yang dilakukan secara berkelanjutan agar dapat meminimalisir kerusakan alam maupun bencana yang akan di timbulkannya. Dengan demikian, desain kebijakan konversi lahan seharusnya mendukung perlindungan lingkungan dengan meminimalisir praktik-praktik illegal oknum aparat. Penegakan regulasi dan aturan yang tegas untuk pelaksana kebijakan di lapangan juga esensial, agar alih fungsi lahan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang telah di tetapkan. Optimalisasi penggunaan lahan tanpa membiarkan kepentingan ekonomi dan politik merusak ekologi dapat dilakukan melalui tindakan evaluasi yang sistematis dan terorganisir dalam penyediaan lahan maupun peralihannya agar peruntukan dan kemanfaatannya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andela, N., Morton, D. C., Giglio, L., Chen, Y., van der Werf, G. R., Kasibhatla, P. S., DeFries, R. S., Collatz, G. J., Hantson, S., Kloster, S., Bachelet, D., Forrest, M., Lasslop, G., Li, F., Mangeon, S., Melton, J. R., Yue, C., & Randerson, J. T. (2017). A human-driven decline in global burned area. *Science*, 356(6345), 1356–1362. <https://doi.org/10.1126/science.aal4108>
- Boehm, H.-D. V., & Siegert, F. (2001). Ecological impact of the 1997/98 forest fires in Southeast Asia: A case study from East Kalimantan, Indonesia. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-56785-2>
- Boehm, H.-D. V., & Siegert, F. (2004). Assessment of the 1998 forest fires in East Kalimantan (Indonesia) using multitemporal ERS-2 SAR images. *Earth Interactions*, 8(1), 1-24. [https://doi.org/10.1175/1087-3562\(2004\)8<1:AOTFFI>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1087-3562(2004)8<1:AOTFFI>2.0.CO;2)
- Carlson, K. M., Curran, L. M., Ratnasari, D., Pittman, A. M., Soares-Filho, B. S., Asner, G. P., Trigg, S. N., Gaveau, D., Lawrence, D., & Rodrigues, H. O. (2012). Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(19), 7559-7564. <https://doi.org/10.1073/pnas.1200452109>
- Cochrane, M. A. (2003). Fire science for rainforests. *Nature*, 421(6926), 913–919. <https://doi.org/10.1038/nature01437>
- Gaveau, D. L. A., Sloan, S., Molidena, E., Yaen, H., Sheil, D., Abram, N. K., Ancrenaz, M., Nasi, R., Quinones, M., Wielaard, N., & Meijaard, E. (2014). Four decades of forest persistence, clearance and logging on Borneo. *PLOS ONE*, 9(7), e101654. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101654>
- Gaveau, D. L. A., Sheil, D., Husnayaen, Salim, M. A., Arjasakusuma, S., Ancrenaz, M., Pacheco, P., & Meijaard, E. (2016). Rapid conversions and avoided deforestation: Examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo. *Scientific Reports*, 6, 32017. <https://doi.org/10.1038/srep32017>
- Gaveau, D. L. A., Locatelli, B., Salim, M. A., Yaen, H., Pacheco, P., & Sheil, D. (2019). Rise and fall of forest loss and industrial plantations in Borneo (2000-2017). *Conservation Letters*, 12(3), e12622. <https://doi.org/10.1111/conl.12622>
- Gnych, S., & Daemeter. (2014). *Oil palm and peatlands: Policy and institutional analysis for Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR). https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-111.pdf
- Hooijer, A., Page, S., Canadell, J. G., Silvius, M., Kwadijk, J., Wösten, H., & Jauhainen, J. (2010). Current and future CO₂ emissions from drained

- peatlands in Southeast Asia. *Biogeosciences*, 7(5), 1505–1514. <https://doi.org/10.5194/bg-7-1505-2010>
- Horton, A. J., Constantine, J. A., Hales, T. C., Goetz, S. J., & Galy, V. (2021). *Tropical peatland carbon storage linked to global latitudinal trends in peat recalcitrance*. *Nature Communications*, 12(1), 4568. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24805-2>
- Huijnen, V., Wooster, M. J., Kaiser, J. W., Gaveau, D. L. A., Flemming, J., Parrington, M., Inness, A., Murdiyarso, D., Main, B., & van Weele, M. (2016). Fire carbon emissions over maritime southeast Asia in 2015 largest since 1997. *Scientific Reports*, 6, 26886. <https://doi.org/10.1038/srep26886>
- Ibie, B. F., Adetula, Y. O., & Ojo, O. O. (2016). *Impact of land use change on peatland degradation in the Niger Delta region of Nigeria*. *Journal of Environmental Management*, 183(3), 979–988. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.09.059>
- Levine, N. (2015). The impact of land use change on fire risk. *Journal of Environmental Management*, 158, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.04.046>
- Meijaard, E., Brooks, T. M., Carlson, K. M., Slade, E. M., Garcia-Ulloa, J., Gaveau, D. L. A., Lee, J. S. H., Santika, T., Juffe-Bignoli, D., Struebig, M. J., Wich, S. A., Ancrenaz, M., Koh, L. P., Zamira, N., Abrams, J. F., Prins, H. H. T., Sendashonga, C. N., Murdiyarso, D., Furumo, P. R., ... Sheil, D. (2020). The environmental impacts of palm oil in context. *Nature Plants*, 6(12), 1418–1426. <https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w>
- Pahlow, M., Snowball, J., & Fraser, G. (2016). Land use change and flood risk in urban areas: A case study of Cape Town, South Africa. *Water SA*, 42(4), 577–586. <https://doi.org/10.4314/wsa.v42i4.08>
- Sidele, R. C., Ziegler, A. D., Negishi, J. N., Nik, A. R., Siew, R., & Turkelboom, F. (2006). Erosion processes in steep terrain—Truths, myths, and uncertainties related to forest management in Southeast Asia. *Forest Ecology and Management*, 224(1-2), 199–225. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.12.019>
- Tisna, R. (2025). Menyoal kebun sawit di lahan gambut Kalteng. <https://www.mongabay.co.id/2025/03/09/menyoal-kebun-sawit-di-lahan-gambut-kalteng/>